



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### 1.1. Umum

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengarahkan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan usaha menggeser (peranan) dari kegiatan yang dominan di sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo agar lebih terarah dan berhasil guna serta berdaya guna, maka pemerintah bersama-sama masyarakat telah menetapkan visi, misi dan strategi dalam mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2020. Visi dan misi tersebut tentu saja bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Sidoarjo dan bukan hanya menyentuh wilayah maupun kelompok masyarakat tertentu.

RPJP Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai kedudukan sebagai kerangka dasar pengelolaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran kehendak masyarakat setempat dan berfungsi sebagai arah serta pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pemberian pelayanan masyarakat bagi semua pihak di Kabupaten Sidoarjo. Agenda dan prioritas pembangunan yang telah disusun dan dirancang di dalam RPJMD akan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pemerintahan saat ini maupun tahun mendatang. Pada akhirnya pembangunan yang telah dilaksanakan akan mewujudkan kemakmuran bersama serta tidak boleh ada yang terpinggirkan dari proses dan hasil pembangunan.

Untuk mewujudkan program/kegiatan perencanaan yang sesuai dengan visi, misi dan strategi pembangunan Kabupaten Sidoarjo, sangat diperlukan dukungan data statistik yang akurat, lengkap dan terkini. Data statistik tersebut akan menjadi suatu instrumen



yang sangat berguna untuk memonitor proses pembangunan yang sedang berjalan maupun sebagai alat evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Timur telah melakukan kristalisasi terhadap lebih dari seratus indikator pembangunan yang tertuang dalam PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi 5 (lima) indikator pembangunan utama. Lima Indikator Pembangunan Utama tersebut meliputi 2 (dua) indikator sosial (pengangguran terbuka dan persentase penduduk miskin), 3 (tiga) indikator pembangunan ekonomi (Pertumbuhan ekonomi dan indeks disparitas wilayah) serta 1 (satu) indikator sosial ekonomi (Indeks Pembangunan Manusia).


Pemilihan 5 (lima) Indikator Pembangunan Utama tersebut dimaksudkan untuk lebih memudahkan para perencana pembangunan dan juga seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan, memonitor dan melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan berdasarkan indikator yang relatif lebih ringkas namun tetap komprehensif. Selain itu, kristalisasi indikator utama pembangunan tersebut akan mampu membuat keterbandingan antar waktu dan antar wilayah.

## 1.2. Target Indikator Utama Pembangunan Ekonomi

Sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan, maka sangat penting dan perlu untuk menyajikan angka-angka dari masing-masing indikator utama tersebut sebagai target yang akan dicapai. Penentuan target tersebut juga akan menjadi landasan evaluasi bagi para seluruh pemangku kepentingan terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Sidoarjo.

### 1.2.1. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu



pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ini menyajikan angka-angka periodik, yang masing-masing disusun menurut lapangan usaha, baik atas dasar harga berlaku (*Curent Prices*) maupun atas dasar harga konstan (*Constant Prices*).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

PDRB disajikan secara berkala dirinci menurut lapangan usaha atau sektoral, serta jenis penggunaannya atas dasar harga berlaku dan atas harga konstan pada tahun dasar tertentu. Dalam hal ini, tahun dasar terbaru yang digunakan adalah tahun 2010. Dengan menggunakan tahun dasar (Tahun 2010), artinya pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar berasal dari perkembangan produksinya saja karena faktor harga telah dihilangkan dengan cara mengacu pada harga pada satu titik tahun dasar (harga tahun 2010).

### 1.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah, khususnya pembangunan bidang ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menciptakan pembagian pendapatan masyarakat yang semakin merata dan meningkatkan hubungan ekonomi wilayah. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar mampu memberikan hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati semua lapisan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses terjadinya peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara riil. PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur



pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan semakin besar penciptaan kue pembangunan. Dengan kebijakan terpadu, holistik dan *pro-poor*, maka kue pembangunan tersebut akan bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat.

Rancangan program yang dicanangkan para pemangku kebijakan yang bersinergi dengan pelaku ekonomi di Sidoarjo untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan yang sesuai dengan RPJMD Tahun 2011-2015 meliputi:


1. Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasi.

Peningkatan daya saing sektor UMKM dan koperasimerupakan langkah strategis. Kedua sektor ini memiliki peran besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta pada penciptaan lapangan kerja baru. Peningkatan daya saing kedua sektor ini diharapkan akan menjadi motor untuk peningkatan potensi dan daya saing . Adapun program yang dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan program pengembangan industri kecil dan menengah.

2. Peningkatan pertumbuhan sektor industri, perdagangan, jasa, dan pertanian berbasis agrobisnis.

Beberapa program untuk memacu pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi andalan Kabupaten Sidoarjo antara lain:

- Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri dengan beberapa indikator meningkatnya pelaku usaha perdagangan, meningkatnya penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan serta meningkatnya nilai ekspor daerah.
- Program peningkatan pasar dengan mendorong lebih banyak pedagang yang menempati pasar-pasar yang ada.
- Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- Program peningkatan produksi peternakan dan hasil peternakan.
- Program pengembangan perikanan tangkap

- 
- Program pengembangan destinasi pariwisata
  - Program pengembangan kemitraan
  - Program pengembangan pemasaran pariwisata

### 1.2.3. Statistik Harga Konsumen Perdesaan

Tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan sangat ditentukan oleh tingkat keberhasilan pembangunan, khususnya di sektor pertanian, karena sektor ini masih mendominasi kegiatan perekonomian di daerah pedesaan terutama dalam penyerapan tenaga kerja. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan tersebut adalah daya beli masyarakat pedesaan. Oleh karena itu, informasi tentang harga khususnya harga konsumen berbagai komoditas di daerah pedesaan sangat diperlukan dalam menentukan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah pedesaan.

Pelaksanaan survei ini adalah daerah pedesaan. Di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 masih terdapat 322 pedesaan, sementara status perkotaan terdapat pada 31 kelurahan. Oleh karena itu di tahun 2017 survei harga konsumen pedesaan dilaksanakan hanya pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan Prambon, Tulangan dan Waru. Dasar terpilihnya ketiga kecamatan tersebut dikarenakan sentra produksi pertanian, sehingga pasar yang cenderung ramai di kecamatan tersebut yang menjadi sampel survei harga ini.

### 1.2.4. Indeks Gini

Hasil-hasil pembangunan harus bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Kondisi ini bisa diartikan bahwa proses pembangunan harus dilakukan secara merata di semua wilayah sehingga terjadi peningkatan pendapatan perkapita yang relatif merata pula. Namun demikian, adanya perbedaan posisi geografis, sumber daya maupun sarana dan prasarana antar wilayah



menyebabkan masih adanya ketimpangan/disparitas dari percepatan pembangunan yang terjadi. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang tinggi di daerah tertentu maupun rendahnya tingkat mobilitas faktor-faktor produksi juga merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah.

Ketimpangan perkembangan pembangunan antar wilayah yang berdampak pada tidak meratanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat perlu untuk segera ditanggulangi. Kebijakan yang berkaitan dengan alokasi sumberdaya, kemudahan mobilisasi faktor-faktor produksi sehingga terjadi distribusi pendapatan yang lebih baik harus terprogram secara tepat untuk mengurangi adanya disparitas antar wilayah. Program, kebijakan maupun strategi pembangunan juga harus lebih mempertimbangkan kondisi kewilayahan untuk lebih mendapatkan hasil pendistribusian pendapatan yang lebih merata.

Salah satu indikator untuk memperoleh informasi mengenai tingkat distribusi pendapatan masyarakat adalah Indeks Gini (*Gini Ratio*). Indeks Gini ini akan menghasilkan angka indeks yang lebih besar atau sama dengan nol dan lebih kecil dari satu. Semakin tinggi Indeks Gini berarti distribusi pendapatan semakin rendah dan begitupun sebaliknya semakin rendah Indeks Gini maka akan semakin tidak merata distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

#### 1.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dalam proses pembangunan. Pembangunan manusia ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat dalam semua proses dan kegiatan pembangunan. Dalam kaitannya dengan pembangunan manusia, makna pembangunan suatu perubahan masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia, dilihat dari sisi ekonomi dan sosial. Dengan mengamati perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dan sosial, maka dapat dijadikan sebagai Indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya.



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) merupakan indeks komposit sederhana yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Sebagai alat ukur tunggal dan sederhana, IPM sangat cocok sebagai alat ukur kinerja pembangunan, khususnya pembangunan manusia yang dilakukan di suatu wilayah pada waktu tertentu atau secara lebih spesifik IPM merupakan alat ukur kinerja dari pemerintahan suatu wilayah.

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan Indikator Perekonomian Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 ini sebagai upaya memberikan fakta empiris pembangunan di Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2016. Berbagai program dan strategi pembangunan telah diformulasikan dan diimplementasikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Tujuan pembangunan terutama pembangunan ekonomi yang pada hakikatnya adalah menciptakan masyarakat yang makmur merupakan amanat yang diemban oleh seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Dalam publikasi ini akan dipaparkan berbagai indikator pembangunan terutama pembangunan ekonomi yang merupakan agenda pemabangunan Kabupaten Sidoarjo yaitu PDRB, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, distribusi pendapatan dan beberapa indikator lainnya.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Publikasi Indikator Ekonomi Kabupaten Sidoarjo disusun menjadi 3(lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab I. memuat uraian umum mengenai indikator kinerja utama perekonomian Kabupaten Sidoarjo serta tujuan penulisan dan sistematika penulisan.
2. Bab II. memuat konsep dan definisi mengenai indikator makro ekonomi.
3. Bab III. memuat capaian indikator kinerja pembangunan ekonomi.



4. Bab IV. memuat indikator tujuan strategis pembangunan ekonomi dengan ulasan beberapa indikator terkait APBD dan pembangunan sektoral.
5. Bab V. Kesimpulan dan saran.





## BAB II


### METODOLOGI INDIKATOR EKONOMI

#### 2.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Menurut definisinya, PDRB adalah total nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu tanpa melihat faktor kepemilikan. Jadi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara Agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/ balas jasa kepada faktor-faktor produksi di daerah tersebut, atau merupakan “*PRODUCTION ORIGINATED*”.

Di dalam PDRB disebutkan bahwa nilai barang dan jasa adalah yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya tahunan atau triwulanan). Rebasing (pergeseran tahun dasar terakhir) adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Uraian lapangan usaha yang disajikan dalam 17 kategori lapangan usaha, yaitu :

1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Pengadaan Listrik dan Gas
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
8. Transportasi dan Pergudangan
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
10. Informasi dan Komunikasi

- 
11. Jasa Keuangan dan Asuransi
  12. Real Estat
  13. Jasa Perusahaan
  14. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
  15. Jasa Pendidikan
  16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
  17. Jasa Lainnya

PDRB disajikan dalam dua dasar penghitungan:

- a. Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun berjalan. Dalam melihat struktur ekonomi suatu wilayah, biasanya digunakan PDRB atas dasar harga berlaku.
- b. Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), yaitu penyajian PDRB yang menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu (disebut tahun dasar). Mulai tahun 2005 penghitungan PDRB atas dasar harga konstan yang didasarkan pada harga-harga tahun 2000. Karena menggunakan harga konstan (tetap), maka perkembangan agregat dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan perkembangan riil dari kuantum produksi dan sudah tidak mengandung fluktuasi harga (inflasi/deflasi). Dengan penyajian ADHK ini, pertumbuhan riil ekonomi dapat dihitung.

## **2.2. Pertumbuhan Ekonomi Atas Dasar Harga Konstan 2010**

Pertumbuhan PDRB diperoleh dari pengolahan indeks berantai PDRB atas dasar harga konstan 2010. Indeks berantai tersebut merupakan hasil pembagian nilai PDRB masing-masing tahun dengan nilai PDRB pada tahun sebelumnya. Apabila angka indeks ini dikalikan dengan 100, dan hasilnya dikurangi 100, maka akan didapatkan nilai yang menunjukkan tingkat agregat pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun.

Penghitungan pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun dirumuskan sebagai berikut:



$$PE = IB - 100 = \left[ \frac{PDRB_t}{PDRB_{t-1}} \times 100 \right] - 100$$

Dimana:

- $PE$  = Pertumbuhan Ekonomi
- $IB$  = Indeks berantai masing-masing tahun
- $PDRB_t$  = PDRB tahun ke- t
- $PDRB_{t-1}$  = PDRB tahun ke- t-1

### 2.3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Besaran ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin besar jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB perkapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu wilayah semakin baik tingkat perekonomian wilayah tersebut, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk.

Meskipun terdapat keterbatasan, Indikator PDRB perkapita ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa di wilayah tersebut.

Dalam rangka mengakomodir rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai tahun dasar yang digunakan dalam penghitungan PDB/PDRB dan melaksanakan kesepakatan bersama maka mulai tahun 2014 penyusunan PDRB Kabupaten Sidoarjo menggunakan tahun 2010 sebagai tahun dasar baru.

PDRB perkapita umumnya disajikan atas dasar harga berlaku yang dirumuskan sebagai berikut:

$$PDRB \text{ per Kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{\text{Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

Peningkatan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku ini masih memiliki keterbatasan, yaitu belum menunjukkan peningkatan sebenarnya dari daya beli perkapita karena beberap[a hal sebagai berikut:



- a. PDRB perkapita masih belum dapat mendeteksi kesenjangan penguasaan aset dan penerimaan balas jasa faktor produksi. Angka ini baru memberi petunjuk rata-rata pendapatan perkapita suatu wilayah.
- b. Tingkat kenaikan harga masih ada di dalamnya.
- c. Tingkat pertumbuhan penduduk juga masih berpengaruh.

#### 2.4. Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan dalam perekonomian ketika terjadi kenaikan harga-harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. Kenaikan harga-harga ini dapat terjadi karena kuatnya permintaan masyarakat (*demand pull inflation*), meningkatnya biaya produksi secara terus menerus (*cost push inflation*) atau karena perilaku permintaan dan penawaran tidak seimbang.

Naik turunnya harga ini dipantau secara mingguan, dua mingguan dan bulanan berdasarkan paket komoditas hasil pendataan Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2010. Survei Biaya Hidup juga menghasilkan Nilai Konsumsi Dasar ( $P_0Q_0$ ), yaitu nilai yang dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memperoleh suatu komoditi yang dikonsumsi pada tahun dasar (tahun dilakukannya SBH).

Dalam harga yang dikumpulkan dan Nilai konsumsi hasil SBH diolah dalam bentuk indeks yang dikenal dengan sebutan Indeks Harga Konsumen (IHK). Tidak seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur melaksanakan SBH. Kabupaten Sidoarjo untuk penghitungan nilai konsumsi menggunakan nilai konsumsi Kota Surabaya sebagai kota terdekat yang melaksanakan SBH.

Formula indeks yang digunakan untuk menghitung IHK masing-masing kota adalah berdasarkan *Formula Laspeyres* dengan modifikasi sebagai berikut:

$$IHK_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}}{\sum_{i=1}^k P_{0i}Q_{0i}} \times P_{(n-1)i}Q_{0i} \times 100$$

Dimana:

- $IHK_n$  = Indeks Harga Konsumen bulan ke- $n$   
 $P_{ni}$  = Harga jenis barang  $i$ , bulan ke-  $n$   
 $P_{(n-1)i}$  = Harga jenis barang  $i$ , bulan ke-  $(n-1)$   
 $P_{(n-1)i}Q_{0i}$  = Nilai konsumsi jenis barang  $i$ , bulan ke-  $(n-1)$   
 $P_{ni}Q_{0i}$  = Nilai konsumsi jenis barang  $i$ , pada bulan dasar  
 $K$  = banyaknya jenis barang paket komoditas dalam sub kelompok.

Sedangkan laju inflasi bulanan suatu kota dihitung dengan menggunakan rumus:

$$LI_n = \frac{I_n - I_{(n-1)}}{I_{(n-1)}} \times 100\%$$

Dimana:


- $LI_n$  = Laju Inflasi bulan ke-  $n$   
 $I_n$  = Indeks bulan ke-  $n$   
 $I_{(n-1)}$  = Indeks bulan ke-  $(n-1)$

## 2.5. Statistik Harga Konsumen Perdesaan

Harga Konsumen Perdesaan meliputi harga berbagai komoditas baik makanan maupun non makanan yang banyak dikonsumsi masyarakat perdesaan. Data yang disajikan dalam publikasi ini adalah data harga konsumen untuk komoditas makanan dan non makan di daerah perdesaan selama tahun 2017 yang dirinci menurut bulan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan harga konsumen dari komoditas-komoditas tersebut.

Metode Pengumpulan Data Harga Konsumen Perdesaan dilakukan oleh Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) menggunakan daftar:

1. HKD-1 untuk mencatat harga-harga kebutuhan rumah tangga petani Kelompok Makanan di pedesaan
2. HKD-2.1 untuk mencatat harga-harga kebutuhan rumah tangga petani Kelompok Non Makanan (Konstruksi, jasa dan transportasi) di pedesaan
3. HKD-2.2 untuk mencatat harga-harga kebutuhan rumah tangga petani Kelompok Non Makanan (Aneka Perlengkapan Rumah Tangga dan Lainnya) di pedesaan



Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara langsung ke pedagang eceran yang berada di pasar perdesaan. Pencacahan dilakukan setiap bulan antara tanggal 10-14. Pencatatan harga setiap jenis komoditas atau kualitas/merk di masing-masing pasar dilakukan terhadap tiga atau empat pedagang. Harga yang dicatat dalam daftar HKD (HKD-1; HKD-2.1 dan HKD-2.2) merupakan harga yang terbanyak muncul (modus) atau rata-rata harga. Hasil pencatatan yang ada dalam daftar HKD tersebut selanjutnya dipindahkan ke register HKD. Setelah daftar harganya disalin, daftar HKD dikirim ke BPS Kabupaten, sedangkan register HKD disimpan KSK untuk membantu dalam mengisi harga bulan sebelumnya pada daftar HKD sebelum KSK melakukan pengumpulan data. Daftar HKD di entri di BPS Kabupaten kemudian hasil entri data tersebut dikirim ke BPS.

Sampel HKD di Kabupaten Sidoarjo 2017, kecamatan yang terpilih menjadi sampel adalah Kecamatan Waru dengan pemantauan harga di UPTD pasar Wadungasri; Kecamatan Tulangan di Pasar Tulangan; Kecamatan Prambon di Pasar Prambon.

#### **Metode Penghitungan Rata-Rata Harga.**

Formula penghitungan rata-rata harga tiap komoditas di di masing-masing provinsi untuk Januari menggunakan rata-rata geometrik. Selanjutnya untuk penghitungan Februari sampai Desember menggunakan relatif harga, yaitu rata-rata geometrik dari rasio harga bulan bersangkutan dengan harga bulan sebelumnya. Bila menggunakan notasi matematika maka penghitungannya adalah sebagai berikut:

$$\bar{P}_{(Jan)} = \sqrt[n]{P_{(Jan)}i}$$

Dimana,

$\bar{P}_{(Jan)}$  = rata-rata harga Januari

$n$  = jumlah observasi

$i$  = Kecamatan ke -i

kemudian,

$$P_{jt} = P_{j(t-1)} \times \frac{RH_{j(t)}}{100}$$

Dimana,

$P_{jt}$  = Harga komoditas j pada bulan ke -t

t = Bulan ke-t

$$RH_{(t)j} = \sqrt[k]{\prod_{i=1}^k \left( \frac{P_{(t)ji}}{P_{(t-1)ji}} \right)}$$

dimana,

$RH_{(t)j}$  = Relatif harga komoditas ke-j untuk bulan ke -t

$P_{(t)ji}$  = Harga komoditas ke -j untuk bulan ke -t di kecamatan ke -i

$P_{(t-1)ji}$  = Harga komoditas ke -j untuk bulan ke -(t-1) di kecamatan ke -i

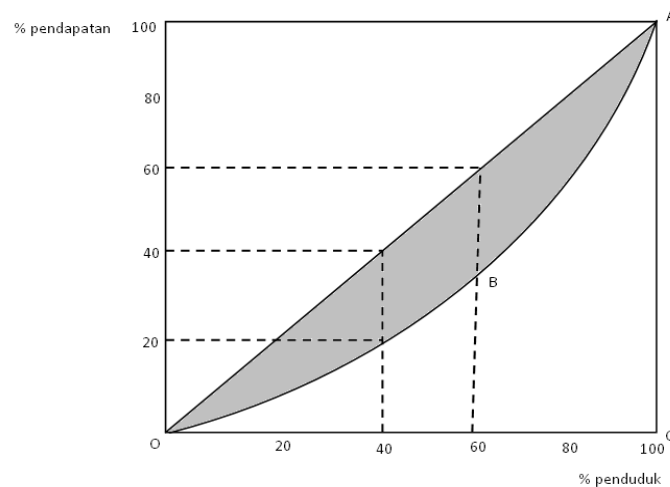
## 2.6. Indeks Gini

Indeks Gini atau Koefisien Gini adalah sebuah ukuran yang menunjukkan apakah pendistribusian dari pendapatan merata secara nyata. Koefisien Gini merupakan rasio antara garis 45 derajat dengan Kurva Lorenz dan area dalam segitiga. Koefisien ini bernilai 0 (nol), jika distribusi menyebar merata secara nyata, dan mendekati 1 (satu), jika secara nyata menyebar tidak merata. Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, *tinggi* jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, *sedang* jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan *rendah* jika kurang dari 0,36.

Untuk mendapatkan Gini rasio, data yang digunakan adalah data rata-rata pengeluaran perkapita sebulan yang lalu dari hasil Susenas. Data tersebut diurutkan berdasarkan rata-rata pengeluaran perkapita sebulan dari yang terendah sampai tertinggi. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan menjadi lima kelompok penduduk yang

jumlahnya sama besar, berdasarkan urutan tersebut. Kemudian dihitung persentase total pengeluaran untuk tiap kelompok. Dengan metode ini, selain dapat diperoleh Koefisien Gini, juga dapat diperoleh indikator distribusi pendapatan (pengeluaran) menurut Bank Dunia. Bentuk umum dari Kurva Lorenz yang menggambarkan antara kumulatif penduduk dengan kumulatif pengeluaran adalah seperti gambar berikut:

Gambar 2.1  
Kurva Lorenz



Data yang diperoleh kemudian dilakukan scatter plot, dengan terlebih dahulu mengkumulatikan total pengeluaran perkapita, sehingga akan diperoleh hasil plot seperti gambar 2.1. Formula untuk menghitung Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$Gini\ Ratio = \frac{Luas\ daerah\ yang\ terletak\ di\ antara\ OA\ dan\ OAB}{Seluruh\ daerah\ OAO'}$$

Atau,

$$Gini\ Ratio = \sum_{k=1}^{n-1} C_{k+1}P_k - \sum_{k=1}^{n-1} C_kP_{k+1}$$

Dimana,

- C = Persentase kumulatif konsumsi,
- P = Persentase kumulatif penduduk,
- k = Kelompok kelas ke- (1,2,3,...,n).





## 2.7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)


Kebijakan politik desentralisasi yang ditandai dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, memberikan hak otonomi bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diserahkan kepada pemerintah daerah kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, pendidikan, moneter dan fiskal.

Pemerintahan daerah juga diberi kewenangan untuk mengelola keuangan daerahnya melalui UU No. 33 Tahun 2004 serta disusul dengan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahunnya ditetapkan dengan peraturan daerah. Proses penetapan APBD dilakukan oleh kepala daerah dengan persetujuan dari DPRD dan diberlakukan untuk masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

APBD yang direncanakan setiap tahun pada dasarnya menunjukkan dari mana sumber-sumber Pendapatan Daerah, berapa besar alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit. Struktur APBD berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Tentang Keuangan Daerah, terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

APBD tidak hanya sekedar rencana keuangan daerah, tetapi juga merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang mencerminkan bagaimana arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah yang harus dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat serta didistribusikan secara patut dan adil. Pelaksanaan pelayanan publik di daerah sangat berkaitan erat dengan kebijakan Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Aktivitas pembangunan dan pemerintahan di daerah dapat dilihat dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Struktur APBD akan mampu memperlihatkan keseriusan



suatu pemerintah daerah dalam mengelolakeuangan daerah mulai dari besaran potensi penerimaan yang akan digali, ke arah mana belanja daerah itu difokuskan atau dari mana defisit anggaran akan dibiayai. Dari struktur dan porsibelanja daerah dapat diketahui kecenderungan belanja daerah, apakah cenderung padapenyelenggaraan pemerintahan dan aparaturn pemerintahan atau cenderung pada penyelenggaraanpembangunan daerah<sup>1</sup>.

Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menganalisis keefektifan dari program pembangunan pemerintah termasuk pemerintah daerah adalah melalui besaran rasio belanja pegawai terhadap total APBD. Rasio ini memperlihatkan rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah. Semakintinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai dan begitu sebaliknya semakin kecil angka rasio belanja pegawai maka semakin kecilpula proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai.

Belanja pegawai yang dihitung dalam rasio ini meliputi belanja pegawai langsung dan belanja pegawai tidak langsung. Belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja pegawai secara implisit memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain belanja pegawainya. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar belanja pegawai yang bisa didanai, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

## **2.8. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

UNDP merekomendasikan tingkat keberhasilan pembangunan suatu negara secara minimal dapat direfleksikan dengan tingkat pemenuhan tiga dimensi dasar, yaitu:

- 1) Umur Panjang dan Hidup Sehat (*a long and helaty life*)

Dimensi ini dicerminkan oleh Angka Harapan Hidup (*life expectancy at age 0: eo*)

---

<sup>1</sup>Mochamad Fajar Hidayat, Ghozali Maski, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur), Jurnal Ilmiah, Tahun 2013.



2) Pengetahuan (*knowledge*)

Dimensi ini dicerminkan oleh dua kriteria, yaitu :

- a. Harapan Lama Sekolah (HLS)
- b. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

3) Standar Hidup Layak (*decent dtandard of living*)

Dimensi ini dicerminkan oleh PDB per kapita. BPS merefleksikan dimensi ini melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Formula untuk menghitung angka IPM adalah sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pengetahuan} \times I_{pendapatan}}$$

Dimana,

$$\diamond I_{kesehatan} = \frac{e_0 - e_{0 \min}}{e_{0 \max} - e_{0 \min}}$$

- $I_{kesehatan}$  = Indeks Kesehatan
- $e_0$  = Angka harapan hidup
- $e_{0 \min}$  = Angka harapan hidup minimal
- $e_{0 \max}$  = Angka harapan hidup maksimal

$$\diamond I_{pengetahuan} = \frac{I_{EYS} + I_{MYS}}{2}$$

- $I_{pengetahuan}$  = Indeks Pengetahuan/ Pendidikan
- $I_{EYS}$  = Indeks Angka Harapan Sekolah
- $I_{MYS}$  = Indeks Rata-rata Lama Sekolah

$$\diamond PPP_j = \prod_{i=1}^m \left( \frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

$p_j$  : harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$   
 $p_k$  : harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan  
 $m$  : jumlah komoditas

- $p_{ik}$  = harga komoditas  $i$  di Jakarta Selatan
- $p_{ij}$  = harga komoditas  $i$  di kab/kota  $j$
- $m$  = jumlah komoditas

**BAB III**  
**INDIKATOR PARADIGMA PEMBANGUNAN EKONOMI**

**3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 - 2017**

Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ADHB) Kabupaten Sidoarjo terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masing-masing sebesar; 117,74 trilyun rupiah (2013), 131,64 trilyun rupiah (2014), 146,08 trilyun rupiah (2015), 160,020 trilyun rupiah (2016) dan 174,280 trilyun rupiah (2017).

**Tabel 3.1.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**Atas Dasar Harga Berlaku 2015 – 2017 (milyar rupiah)**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,559,687	3,817,558	4,055,643
B	Pertambangan dan Penggalian	139,475	141,810	159,920
C	Industri Pengolahan	68,562,265	73,612,756	80,314,623
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,703,576	1,727,112	1,798,007
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	96,413	104,511	112,907
F	Konstruksi	13,228,282	14,631,053	16,006,572
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	23,055,490	25,623,447	28,139,685
H	Transportasi dan Pergudangan	17,095,795	19,623,165	21,275,284
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,763,894	5,453,141	6,013,346
J	Informasi dan Komunikasi	5,036,600	5,588,595	6,094,635
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,846,582	2,053,166	2,183,944
L	Real Estate	1,335,786	1,461,789	1,564,212
M,N	Jasa Perusahaan	229,403	253,009	275,387
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,666,420	2,942,523	3,113,756
P	Jasa Pendidikan	1,766,932	1,913,688	2,024,851
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	455,188	492,318	553,990
R,S,T,U	Jasa lainnya	539,100	581,013	613,326
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>146,080,890</b>	<b>160,020,653</b>	<b>174,280,088</b>

Sedangkan nilai PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir masing-masing sebesar; 99,99 trilyun rupiah (2013), 106,43 trilyun rupiah (2014), 112,01 trilyun rupiah (2015), 118,18 trilyun rupiah (2016) dan 125,04 trilyun rupiah (2017).

**Tabel 3.2.**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**  
**Atas Dasar Harga Konstan 2015 – 2017 (milyar rupiah)**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,509,247	2,604,216	2,654,505
B	Pertambangan dan Penggalian	139,257	146,552	151,053
C	Industri Pengolahan	55,755,893	58,274,852	61,596,911
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,144,906	1,123,397	1,148,320
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	87,382	90,929	96,740
F	Konstruksi	10,144,359	10,777,948	11,538,529
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	17,938,334	19,059,370	20,271,722
H	Transportasi dan Pergudangan	9,150,104	9,833,803	10,401,337
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,694,811	4,023,275	4,344,218
J	Informasi dan Komunikasi	4,744,061	5,132,599	5,494,448
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,347,524	1,446,720	1,490,045
L	Real Estate	1,079,860	1,154,478	1,198,695
M,N	Jasa Perusahaan	177,623	187,339	197,606
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,973,449	2,070,543	2,118,373
P	Jasa Pendidikan	1,324,622	1,405,821	1,451,229
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	366,262	387,725	407,266
R,S,T,U	Jasa lainnya	435,166	459,623	478,061
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>112,012,859.7</b>	<b>118,179,189.9</b>	<b>125,039,056.4</b>

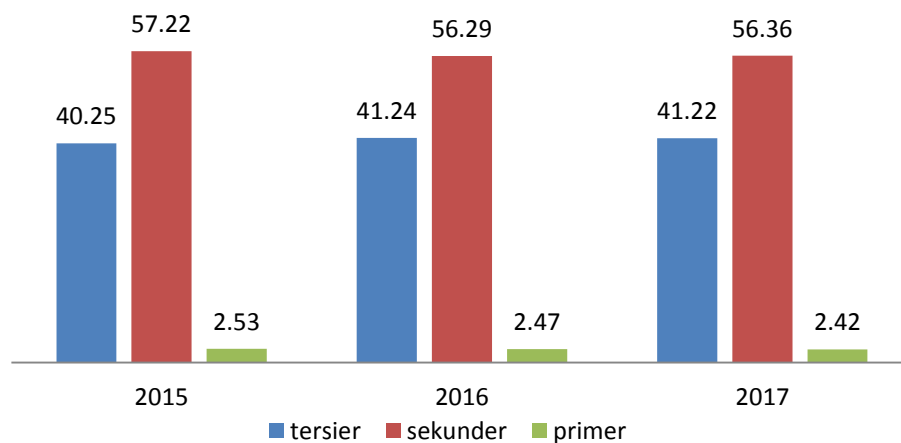
Selama lima tahun terakhir (2013-2017) struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi dan Informasi dan Komunikasi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Sidoarjo.

Aktivitas pembangunan khususnya bidang ekonomi di Kabupaten Sidoarjo telah mengalami pergeseran struktur dari sektor primer ke arah sektor sekunder dan tersier. Pada sektor primer, kontribusinya dalam mendukung perekonomian Sidoarjo selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini terhadap pembentukan PDRB stabil di bawah 3 persen. Penurunan peranan sektoral ini disebabkan oleh karena kedua lapangan usaha yang tergabung dalam kelompok ini, secara bersamaan mengalami penurunan kontribusinya terhadap Total PDRB (Pertanian dan Pertambangan/ Penggalian).

Kontribusi sektor sekunder mulai menurun, dari 57 persen di tahun 2015 menjadi 56 persen di tahun 2017. Lapangan usaha industri sebagai penentu sektor sekunder bertahap menurun kontribusinya terhadap PDRB.

Sedangkan kontribusi sektor tersier mulai beranjak naik. Kontribusi sektor ini lebih dari 41 persen di tahun 2017. Perkembangan yang pesat dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sangat membantu kemajuan sektor ini. Lapangan usaha transportasi di Sidoarjo didominasi oleh angkutan udara.

**Grafik 3.1.**  
**Perbandingan Sektoral PDRB Kabupaten Sidoarjo**  
**Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku**  
**Tahun 2015 – 2017**




### 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014-2017

PDRB Kabupaten Sidoarjo Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus meningkat. Peningkatan nilai PDRB ini sejalan dengan membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Sidoarjo. Peningkatan PDRB tersebut tentunya belum bisa menggambarkan pertumbuhan perekonomian secara riil, mengingat nilai PDRB atas dasar harga berlaku tersebut masih mengandung pengaruh perubahan harga. Untuk melihat pertumbuhan riil di Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 (tahun dasar 2010), dimana pertumbuhan ekonomi ini sudah bebas dari pengaruh perubahan harga (pertumbuhan yang benar-benar diakibatkan dari adanya perubahan jumlah nilai produk barang dan jasa).

Tabel 3.3.  
Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha  
Kabupaten Sidoarjo  
Tahun 2014 – 2017 (persen)

Kategori	Uraian	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.63	4.69	3.78	1.93
B	Pertambangan dan Penggalian	15.05	-8.24	5.24	3.07
C	Industri Pengolahan	7.28	5.69	4.52	5.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7.32	-3.25	-1.88	2.22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.91	4.19	4.06	6.39
F	Konstruksi	6.67	3.66	6.25	7.06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.53	4.64	6.25	6.36
H	Transportasi dan Pergudangan	0.57	5.27	7.47	5.77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9.02	8.08	8.89	7.98
J	Informasi dan Komunikasi	8.74	6.88	8.19	7.05
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.63	6.99	7.36	2.99
L	Real Estate	6.78	5.74	6.91	3.83
M,N	Jasa Perusahaan	6.68	5.05	5.47	5.48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.28	2.11	4.92	2.31
P	Jasa Pendidikan	6.48	7.21	6.13	3.23
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.17	5.09	5.86	5.04
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.27	4.07	5.62	4.01
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>		<b>6,44</b>	<b>5,24</b>	<b>5,51</b>	<b>5,80</b>



Percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 5,58 persen, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 5,51 persen. Iklim ekonomi mulai membaik di Sidoarjo didukung stabilitas perekonomian nasional yang baik dan inflasi yang rendah di Jawa Timur dan nasional.


Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan kinerja ekspor luar negeri. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan dan tol, bangunan serta perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya. Ekspor luar negeri yang dimaksud utamanya ekspor ke Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang serta negara-negara di kawasan ASEAN. Tiga negara utama tujuan ekspor di kawasan ASEAN adalah Singapura, Malaysia, dan Vietnam.

Posisi geografis Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Surabaya sebagai ibukota provinsi Jawa Timur memberikan pengaruh positif pada perkembangan kegiatan ekonomi di daerah ini. Mobilitas penduduk dan juga sentra-sentra ekonomi yang sudah relatif terlalu padat di Surabaya menuju daerah sekitar Surabaya termasuk Kabupaten Sidoarjo semakin mempercepat perkembangan perekonomian yang ada. Perkembangan sektor properti, pengembangan lokasi industri serta sentra perdagangan di daerah ini tentunya tidak terlepas dari semakin besarnya potensi pasar yang ada di Sidoarjo.

Pertumbuhan lapangan usaha industri sebagai lokomotif pembangunan di Sidoarjo sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional. Di lapangan usaha industri, pembentukan nilai tambah pada kategori ini masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan industri berskala besar dan sedang yang mempekerjakan tenaga kerja minimal 20 orang. Sedangkan menjamurnya industri mikro dan kecil (UMKM), kerajinan dan rumah tangga yang mampu memberdayakan tenaga kerja dari daerah setempat, mencapai kurang dari 10 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai angka 7 persen dicapai oleh 3 lapangan usaha, yaitu lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,98 persen; lapangan usaha Konstruksi sebesar 7,06 persen dan lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 7,05 persen.






Kondisi tersebut juga tergambarkan dari sektor akomodasi dan makan, minum yang terdiri dari hotel, penginapan dan juga restoran serta warung makan maupun kedai yang selalu penuh dengan pengunjung selama tiga tahun terakhir. Pertumbuhan pada sektor konstruksi yang berkaitan dengan kegiatan properti dan juga pembangunan infrastruktur lainnya selama tiga tahun terakhir terlihat relatif tinggi. Hal tersebut tidak lepas dari masih tingginya potensi pasar properti akibat dari tingginya mobilitas maupun pertumbuhan jumlah penduduk yang masih cukup tinggi.

Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya mengalami pertumbuhan yang positif. Sembilan lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen. Sedangkan delapan lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari 5 persen.

Sembilan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar 5 hingga 10 persen tersebut antara lain: lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Konstruksi; Informasi dan Komunikasi; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 6,39 persen; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,36 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 5,77 persen; Industri Pengolahan sebesar 5,70 persen; Jasa Perusahaan sebesar 5,48 persen dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 5,04 persen.

Sedangkan delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 4,01 persen; lapangan usaha Real Estate sebesar 3,83 persen; lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 3,23 persen; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 3,07 persen; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 2,99 persen; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,31 persen; lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 2,22 persen dan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,93 persen.

Sektor perdagangan tercatat memiliki pertumbuhan yang tinggi. Berdirinya beberapa sentra perdagangan dan juga semakin banyaknya lokasi perumahan baru menjadi penggerak munculnya usaha perdagangan baru untuk memenuhi permintaan pasar yang




masih cukup tinggi. Lapangan usaha perdagangan dan restoran diperkirakan akan tumbuh pesat selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Dari data Sensus Ekonomi 2016 tercatat bahwa jumlah kegiatan usaha di lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor lebih dari ini lebih dari 76 ribu unit usaha. Sedangkan unit usaha lapangan usaha akomodasi makan dan minum mencapai 36 ribu usaha. Dibanding jumlah penduduk saat ini (2,183 juta jiwa), dan pertumbuhan penduduk 1,5 persen per tahun, diharapkan kedua sub sektor ini akan mampu menjadi motor penggerak perekonomian di Sidoarjo pada masa mendatang. Disamping memiliki pasar yang potensial bagi produk barang dan jasa di tingkat lokal, ekspor Sidoarjo ke luar negeri selama 5 tahun terakhir juga selalu terjaga di atas US\$ 1 milyar.

Jika kondisi perekonomian berjalan normal, sektor tersier yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 7-9 persen per tahun, dalam waktu sekitar 5 tahun akan mampu melampaui peranan sektor sekunder yang memiliki rata-rata pertumbuhan ekonomi 4-5 persen per tahun.

### **3.3. Struktur Perekonomian**

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Apabila sebuah sektor memiliki kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, apabila sektor yang mempunyai kontribusi besar terhadap totalitas perekonomian tersebut mampu mencapai pertumbuhan tinggi, maka sektor tersebut secara otomatis akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total.

Peran kelompok sektor *primer* (pertanian, pertambangan dan penggalian) di Kabupaten Sidoarjo relatif kecil dibanding dengan sektor *sekunder* dan sektor *tersier*. Adanya konversi dari lahan produktif menjadi perumahan maupun lokasi industri baru akan lebih mendorong semakin rendahnya kontribusi kelompok ini terhadap total PDRB




Kabupaten Sidoarjo. Ke depan struktur perekonomian Kabupaten Sidoarjo akan semakin bergeser pada kelompok sektor *sekunder* maupun *tersier*.

Peran kelompok sektor *primer* dalam mendukung perekonomian Sidoarjo selama lima tahun terakhir terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor *primer* berkisar 2-3 persen per tahunnya.

Peran kelompok sektor *sekunder* sangat tinggi (56 persen) terhadap total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Peran terbesar ataupun penyumbang nilai tambah terbesar berada pada sub sektor Industri Pengolahan. Pada tahun 2017, sektor industri pengolahan mampu berkontribusi sebesar 46,08 persen terhadap Total PDRB, sehingga naik-turunnya kegiatan ekonomi di sektor ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi sektor sekunder mulai menurun, dari sekitar 60 persen di tahun 2011 menjadi 56 persen di tahun 2017. Lapangan usaha industri sebagai penentu sektor sekunder bertahap menurun kontribusinya terhadap PDRB.

Perlambatan pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan berjalan seiring dengan konsumsi swasta yang menurun, juga dipengaruhi kebijakan pajak, kebijakan UMR yang terus naik dari pemerintah. Kebijakan tersebut membuat pengusaha “berfikir ulang” untuk menata strategi baru. Strategi agar perusahaan tidak merugi, minimal bisa mempertahankan keuntungan yang sama dengan tahun sebelumnya. Begitu pula bagi perusahaan-perusahaan yang bahan bakunya berasal dari impor. Mereka harus membayar cukai yang lebih mahal dari tahun sebelumnya.

Mata rantai menurunnya kegiatan di lapangan usaha industri ini secara langsung akan berimbas pada kegiatan ekonomi di sektor lain yang terkait. Pada tahun 2014, lapangan usaha industri pengolahan mampu tumbuh menembus angka 7 persen per tahun, dengan kontribusi yang dominan sekitar 47 persen terhadap Total PDRB. Di tahun 2017 pertumbuhan lapangan usaha ini melambat sebesar 5,70 persen dengan kontribusi sebesar 46,08 persen terhadap total PDRB. Naik-turunnya kegiatan ekonomi di lapangan usaha ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo.



Bagaimanapun juga lapangan usaha industri tetap menjadi penyumbang *value added* yang terbesar, karena Kabupaten Sidoarjo merupakan kota industri kedua setelah Kota Surabaya yang juga merupakan ring pertama dalam sistim pengupahan termasuk Sidoarjo, Surabaya dan Gresik.

Kontribusi sektor *tersier* mulai beranjak naik terhadap total PDRB Kabupaten Sidoarjo. Kontribusi sektor ini lebih dari 40 persen di tahun 2017. Perkembangan yang pesat dari lapangan usaha transportasi dan pergudangan sangat membantu kemajuan sektor ini. Lapangan usaha transportasi di Sidoarjo didominasi oleh angkutan udara. Keberadaan Bandara Juanda sebagai bandara internasional yang semakin padat aktivitasnya turut mendongkrak peran di sektor ini.

#### **3.4. PDRB Perkapita**

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di suatu daerah tidak bisa secara langsung diartikan meningkat pula kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Dampak pertumbuhan ekonomi tersebut harus bisa dipastikan dinikmati oleh seluruh masyarakat daerah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan relatif kurang berpengaruh pada tingkat kesejahteraan masyarakat jika pertumbuhan jumlah penduduk juga tinggi. Salah satu indikator yang dianggap bisa lebih menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut adalah PDRB perkapita/Pendapatan perkapita.

Dengan definisi PDRB perkapita adalah total PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun, dianggap bahwa tiap penduduk juga ikut merasakan peningkatan atau hasil pertumbuhan jika terjadi peningkatan PDRB perkapita di suatu daerah.

Biasanya semakin tinggi nilai PDRB per kapita dan Pendapatan Regional per kapita, semakin baik pula kondisi perekonomian di wilayah tersebut, meskipun sebenarnya ukuran tersebut belum bisa memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar penduduk. Hal ini disebabkan dari seluruh kegiatan ekonomi yang dihasilkan di suatu wilayah, belum tentu seluruhnya dinikmati oleh penduduk di wilayah yang bersangkutan.

Dari data 5 tahun terakhir, terlihat bahwa peningkatan besaran PDRB masih selalu diikuti dengan kenaikan PDRB per kapita nya. Pada periode 3 tahun terakhir, PDRB Sidoarjo adalah 146,08 triliun rupiah (2015); 160,02 triliun rupiah (2016) dan 174,28 triliun rupiah (2017). Sedangkan PDRB perkapita nya mencapai 68,99 juta rupiah (2015); 74,41 juta rupiah (2016) dan 79,81 juta rupiah (2017). kenaikan besaran PDRB dan PDRB per kapita tiap tahun ini ternyata seiring dengan kenaikan Pendapatan Regional Perkapita (Tabel 3.4).

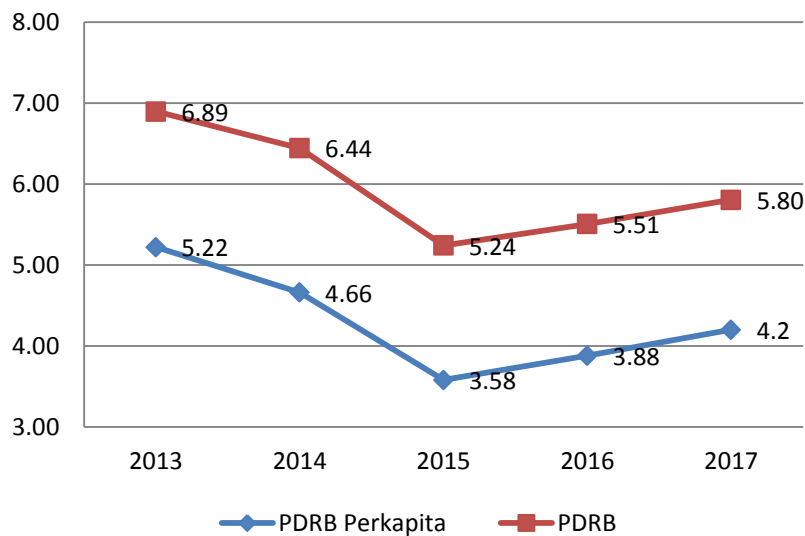
**Tabel 3.4.**  
**Perbandingan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHB)**  
**Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2013-2017**

Nilai PDRB/GRDP (Milliar Rupiah/Billion rupiahs)					
	2013	2014	2015	2016	2017
- ADHB/ at current price	117.743	131.646	146.081	160.021	174.280
- ADHK/ at 2010 Constant Price	99.993	106.434	112.013	118.179	125.039
- ADHB/ at current price	57.464	63.172	68.995	74.412	79.810
- ADHK/ at 2010 Constant Price	48.801	51.074	52.904	54.955	57.261
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ xcGrowth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	5,22	4,66	3,58	3,88	4,20
Jumlah Penduduk (ribu orang)/ Population (Thousand People)	2.049	2.084	2.117	2.150	2.184
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,59	1,71	1,60	1,57	1,54

Dari sisi PDRB atas harga konstan, bisa dilihat bahwa ternyata meskipun besaran PDRB meningkat beriringan dengan PDRB perkapita namun tingkat kenaikannya tidaklah sama. Jika selama 2015-2017, total PDRB mampu mencapai pertumbuhan antara 5,24 – 5,80 persen; maka pada periode yang sama, PDRB perkapita hanya mampu tumbuh antara 3,58 – 4,20 persen.

Pertumbuhan PDRB per kapita tersebut bisa lebih tinggi seandainya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo bisa ditekan lebih rendah lagi. Namun faktanya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir masih mencapai 1,5 persen/tahun. Pertumbuhan penduduk sebesar itu lebih disebabkan oleh arus migrasi masuk, dari pada akibat pertumbuhan alamiah (lahir-mati).

**Grafik 3.2.**  
**Perbandingan Pertumbuhan PDRB dan PDRB Perkapita (ADHK)**  
**Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2013-2017**



### 3.5. Laju Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

Penghitungan inflasi Sidoarjo didasarkan pada hasil pemantauan/ pendataan harga barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada pasar tradisional dan pasar modern di wilayah Sidoarjo. Dari hasil pendataan tersebut diperoleh data bahwa sampai akhir tahun 2017, secara kumulatif Sidoarjo mengalami inflasi sebesar 4.11 persen (lebih tinggi dibanding inflasi kumulatif pada tahun 2016 yaitu sebesar 3.02 persen), sedikit lebih tinggi dibanding inflasi Jawa Timur pada periode yang sama yaitu sebesar 4.04 persen.

Inflasi Kabupaten Sidoarjo menduduki peringkat ke 3 (tiga) inflasi terbesar dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

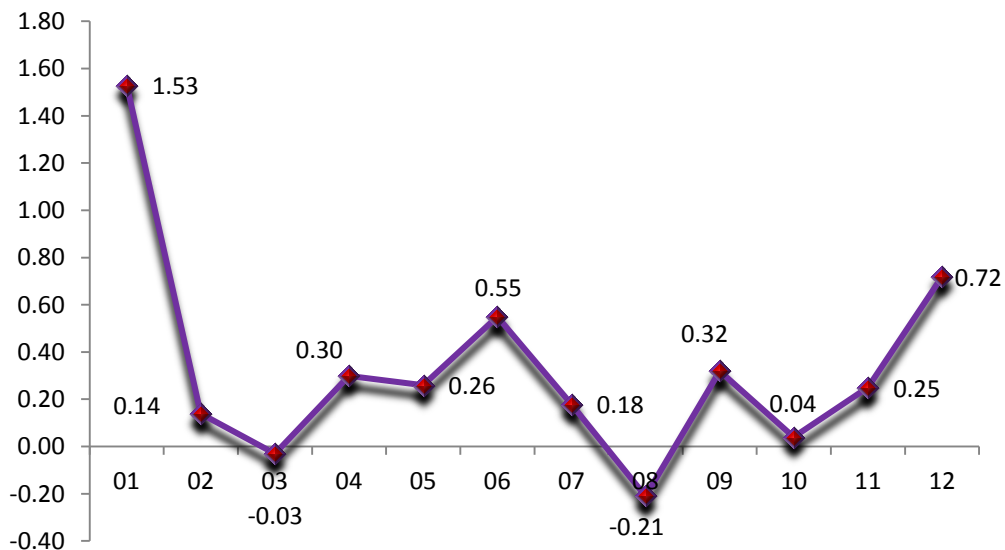
Inflasi pada periode ini, disebabkan oleh penyesuaian tarif PLN secara bertahap dari bulan April sampai Juni 2017. Selain itu inflasi di semester pertama Kabupaten Sidoarjo didorong juga kenaikan perpanjangan STNK dan kenaikan harga BBM. Faktor pendorong lainnya adalah bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 yang bertepatan di bulan Juni.

**Tabel 3.5.**  
**Inflasi Kumulatif 9 Kabupaten Kota dan Jawa Timur**  
**Tahun 2017**

Kelompok dan Sub Kelompok Jenis Barang/ Jasa	B U L A N											
	Jan.	Peb.	Mart.	Aprl.	Mei	Juni	Juli	Agts	Sept.	Okt.	Nop.	Des.
<b>1 SIDOARJO</b>	<b>1,53</b>	<b>1,68</b>	<b>1,65</b>	<b>1,95</b>	<b>2,21</b>	<b>2,78</b>	<b>2,96</b>	<b>2,75</b>	<b>3,07</b>	<b>3,11</b>	<b>3,37</b>	<b>4,11</b>
2 JEMBER	1,46	1,68	1,53	1,81	2,18	2,63	2,70	2,61	2,67	2,50	2,85	3,52
3 BANYUWANGI	0,66	1,01	0,81	1,29	1,62	2,10	2,25	2,14	2,12	2,21	2,55	3,17
4 SUMENEP	0,67	1,32	1,16	1,31	1,98	2,38	2,56	2,31	2,34	2,37	2,96	3,40
5 KEDIRI	0,94	1,64	1,51	1,89	2,41	2,86	2,74	2,56	2,88	2,76	2,99	3,44
6 MALANG	1,45	1,69	1,61	1,96	2,79	3,17	3,48	2,90	2,94	2,97	3,24	3,75
7 PROBOLINGGO	1,15	1,28	0,99	1,44	1,81	2,53	2,45	2,26	2,37	2,20	2,48	3,18
8 MADIUN	1,39	2,22	2,15	2,61	3,20	3,90	4,09	3,92	4,04	4,19	4,29	4,78
9 SURABAYA	1,76	1,92	1,85	2,09	2,49	3,02	3,17	2,97	3,24	3,30	3,49	4,37
<b>JAWA TIMUR</b>	<b>1,52</b>	<b>1,78</b>	<b>1,68</b>	<b>1,98</b>	<b>2,46</b>	<b>2,97</b>	<b>3,12</b>	<b>2,86</b>	<b>3,06</b>	<b>2,67</b>	<b>3,31</b>	<b>4,04</b>

Dari grafik 3.2. berikut dapat dilihat pergerakan inflasi bulanan Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2017. Selama tahun 2017, Kabupaten Sidoarjo mengalami inflasi tertinggi pada bulan Januari 2017 sebesar 1.53 persen. Kondisi tersebut didorong beberapa kenaikan harga komoditas yang sangat signifikan seperti biaya perpanjangan STNK, penyesuaian tarif PLN, kenaikan harga BBM dan mulai tingginya harga bandeng di pasaran. Sementara pada bulan Juni (bertepatan hari raya Idul Fitri) yang biasanya mengalami inflasi tinggi hanya mengalami inflasi 0.55 persen tertinggi no 3 setelah bulan Desember 2017. Inflasi terendah selama tahun 2017 terjadi pada bulan Agustus yaitu -0,21 persen. Deflasi terjadi dua kali selama tahun 2017 yaitu bulan Maret dan Agustus 2017.

**Grafik 3.2.**  
**Perkembangan Inflasi Bulanan Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2017**




Dari tabel 3.1.1 di bawah terlihat bahwa Laju inflasi selama Tahun 2017 (Periode Januari-Desember) sebesar 4.11 persen dengan andil inflasi tiap kelompok sebagai berikut : kelompok bahan makanan sebesar 1.21 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar rumahtangga sebesar 1.12 persen; kelompok transportasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1.06 persen; kelompok makanan jadi, minuman dan rokok sebesar 1.00 persen; kelompok pendidikan rekreasi dan olah raga sebesar 0.23 persen; kelompok



kesehatan sebesar 0.03 persen; dan kelompok sandang sebesar -0.43 persen. Selama tahun 2017 di kelompok sandang secara kumulatif mengalami penurunan harga hal ini dimungkinkan semakin banyaknya pesaing dalam penjualan fashion. Kelompok bahan makanan mengalami perubahan harga tertinggi selama satu tahun, keadaan ini dimungkinkan karena kenaikan beberapa komoditas yang dominan dikonsumsi oleh masyarakat Sidoarjo seperti beras, garam, ikan bandeng, ikan mujair, daging ayam ras, bumbu-bumbuan, buah-buahan. Sementara kelompok yang cukup besar kenaikannya adalah kelompok perumahan dikarenakan penyesuaian tarif PLN selama tahun 2017, kenaikan harga BBM dan kenaikan gas elpiji. Komoditas-komoditas tersebut merupakan komoditas pokok dalam rumah tangga sehingga kenaikan harga sedikitpun dapat menyebabkan terjadinya inflasi.

**Tabel 3.6.**  
**Laju Inflasi dan Andil Inflasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017**  
**(Periode Januari-Desember 2017)**

No.	Kelompok Jenis Barang/Jasa	Inflasi %	Andil %
1	2	3	4
	<i>Umum</i>	4,11	4,11
1	Bahan Makanan	6,33	1,21
2	Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	1,19	1,00
3	Perumahan,Air,Listrik,Gas & Bahan Bakar	0,09	1,12
4	Sandang	0,03	-0,43
5	Kesehatan	0,56	0,03
6	Pendidikan, Rekreasi Dan Olah Raga	0,08	0,23
7	Transpor,Komunikasi Dan Jasa Keuangan	5,48	1,06



Selama tahun 2017 besarnya inflasi Kabupaten Sidoarjo menurut kelompok pengeluaran sebagai berikut: kelompok bahan makanan sebesar 6.33 persen; kelompok makanan jadi, minuman dan rokok sebesar 5.64 persen; kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 4.27 persen; kelompok sandang sebesar -7.57 persen; kelompok kesehatan sebesar 0.52 persen; kelompok pendidikan rekreasi dan olah raga sebesar 2.37 persen; kelompok transportasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 6.42 persen.

### **3.6. Statistik Harga Konsumen Perdesaan Kabupaten Sidoarjo 2017**


#### **A. Kelompok Makanan**

Secara umum, harga eceran di perdesaan untuk konsumsi makanan selama tahun 2017 cenderung stabil antar bulannya. Terlihat beberapa komoditas mengalami kenaikan harga di pertengahan tahun dan di dua bulan terakhir. Harga komoditas daging, telur dan ikan cenderung berfluktuatif selama tahun 2017; seperti komoditas daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng, telur ayam ras. Sementara komoditas sayur-sayuran cenderung mengalami penurunan harga menjelang akhir tahun.

Komoditas beras merupakan penyumbang terbesar dalam konsumsi rumah tangga di tahun 2017. Komoditas ini sempat mengalami kenaikan harga pada bulan Mei dan mengalami kenaikan lagi di bulan September sampai Desember. Rata-rata harga beras awal pada tahun 2017 sebesar 9.938 rupiah/kg hingga di akhir tahun 2017 mencapai 10.688 rupiah/kg.

Keadaan ini perlu mendapat perhatian khusus oleh Pemerintah Daerah untuk dapat menjaga kestabilan stok beras di pasar sehingga harga beras tidak terus melonjak. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka harga beras telah mengalami kenaikan 6,88 persen. Di tahun 2017 rata-rata harga beras di pedesaan per kg tertinggi terjadi di bulan Desember.

Selama tahun 2017 rata-rata harga gula juga mengalami fluktuasi dari harga 14.729 rupiah/kg, 13.000 rupiah/kg dan turun lagi sampai bulan Desember mencapai 11.375 rupiah/kg.




Komoditas bawang merah dan bawang putih merupakan tanaman yang sangat dipengaruhi musim sehingga fluktuasi harga untuk komoditas tersebut seringkali mencolok dan sangat bervariasi. Selama tahun 2017 di Kabupaten Sidoarjo harga pedesaan untuk komoditas bawang merah mengalami harga tertinggi pada bulan Maret, yaitu sebesar 31.250 rupiah/kg dan bawang putih pada Mei sebesar 40.000 rupiah/kg. Sedangkan harga terendah untuk bawang merah pada Oktober sebesar 15.375 rupiah/kg dan bawang putih pada Agustus sebesar 18.333 rupiah/kg.

Komoditas bahan pokok lain yang cukup stabil harganya di tahun 2017 adalah telur ayam ras. Harga yang terjadi berkisar antara 17.833 rupiah/kg sampai 22.333 rupiah/kg.

## **B. Kelompok Non Makanan**

Secara umum, harga eceran pedesaan untuk konsumsi non makanan di Kabupaten Sidoarjo pada 2017 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selama tahun 2017 harga semen di pedesaan mengalami kenaikan harga, harga terendah terjadi pada bulan April 2017 sebesar 49.350 rupiah/50 kg dan harga tertinggi pada bulan Mei sampai Desember mencapai 51.100 rupiah/50 kg; semen merupakan salah satu bahan material yang paling dominan digunakan, sehingga komoditas tersebut tidak luput dari pengawasan pemerintah. Komoditas non makanan lain yang cukup berfluktuatif di tahun 2017 adalah pasir, karena komoditas ini sempat mengalami dua kali kenaikan harga hal ini dapat menunjukkan bahwa pembangunan di daerah pedesaan mengalami peningkatan sehingga permintaan akan bahan bangunan cukup tinggi.

Gas LPG merupakan salah satu bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat Sidoarjo, terlebih di daerah pedesaan. Setelah dilakukan pengalihan bahan bakar dari minyak tanah ke gas LPG pada tahun 2007 maka peranan Gas LPG sangat dominan terhadap konsumsi rumah tangga sehari-hari di pedesaan. Oleh sebab itu, harga komoditas ini selalu dimonitor oleh pemerintah secara intensif. Selama tahun 2017 harga Gas LPG di pedesaan secara rata-rata relatif tidak bergejolak di awal semester, meskipun di trimester terakhir terjadi kenaikan harga yang cukup signifikan baik untuk gas LPG 12 kg dan LPG 3 kg. Harga Gas LPG



terendah terjadi pada awal tahun Gas LPG 3 kg sebesar 16.833 rupiah/tabung dan Gas LPG ukuran 12 Kg sebesar 139.500/tabung.

Angkutan transportasi darat (luar kota dan dalam kota) merupakan alat transportasi yang sering digunakan oleh masyarakat perdesaan sehari-hari di Kabupaten Sidoarjo. Secara umum, pada 2017 rata-rata tarif angkutan dalam kota stabil sebesar 6.917 rupiah/orang. Sementara rata-rata tarif angkutan luar kota sempat naik di bulan Juni sebesar 60.000 rupiah/orang yang sebelumnya hanya 55.000 rupiah/orang. Sedangkan harga komoditas bahan bakar minyak (BBM) harganya stabil di 6.550 rupiah/liter untuk bensin dan 5.150 rupiah/liter untuk solar.

### **3.7. Indeks Gini**

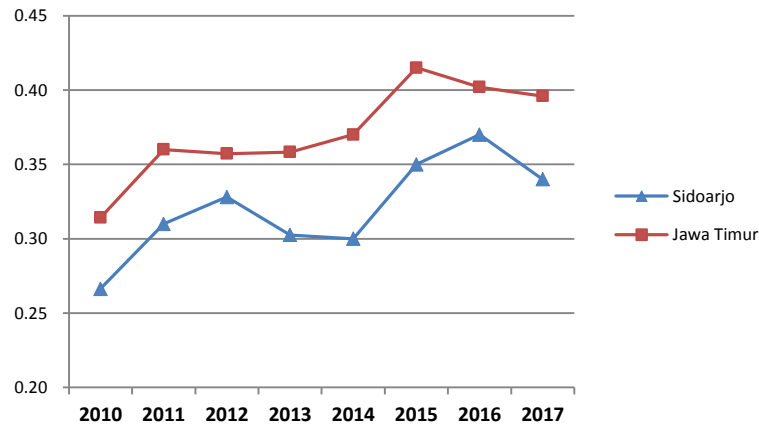
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak secara langsung memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Hasil pembangunan harus mampu secara “merata” dinikmati oleh seluruh penduduk di daerah tersebut. Diperlukan kebijakan untuk penyiapan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi agar mampu berkompetisi pada pasar kerja yang tersedia diharapkan akan mengurangi kesenjangan terhadap distribusi hasil pembangunan yang ada. Salah satu indikator yang dianggap bisa memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan distribusi pendapatan yang ada di suatu daerah adalah indeks Gini (Gini Rasio).

Gini rasio memiliki nilai antara 0 dan 1 (digunakan dalam bahasan ini), atau jika dalam persen maka nilainya antara 0 dan 100 persen. Berdasarkan nilai Gini rasio, terdapat 3 (tiga) kelompok ketimpangan, *tinggi* jika koefisien gini bernilai 0,50 atau lebih, *sedang* jika nilainya diantara 0,36-0,49 dan *rendah* jika kurang dari 0,36.

Gini rasio kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.30, dalam arti bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan *rendah*. Gini rasio selama kurun waktu tahun 2010 – 2017 adalah masing-masing 0,27 persen, 0.31 persen, 0.33 persen, 0.30 persen, 0.30 persen, 0.35 persen, 0.37 persen dan 0.34 persen (grafik 3.3.).



**Grafik 3.3.**  
**Perkembangan Gini Rasio Kabupaten Sidoarjo dan Provinsi Jawa Timur**  
**Tahun 2010-2017**



### 3.8. Realisasi APBD

Struktur anggaran daerah mencerminkan besar kecilnya upaya pemerintah daerah dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk kreatif dan inovatif terkait dengan penganggaran dikarenakan adanya keterbatasan potensi dan sumber daya yang ada. Dengan sumber daya yang terbatas, pemerintah daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja pegawai secara implisit memberikan indikasi bahwa pemerintah daerah tersebut hanya menganggarkan sebagian kecil APBD-nya untuk jenis-jenis belanja selain belanja pegawainya. Hal ini akan menyebabkan keterbatasan program dan kegiatan daerah di luar belanja pegawai yang bisa didanai, khususnya yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 mencapai 4 trilyun rupiah. Mengalami kenaikan sebesar 10,29 persen dari tahun sebelumnya. Secara agregat, Pendapatan Asli Daerah mampu penyumbang 1,67 trilyun rupiah terhadap pendapatan

daerah Kabupaten Sidoarjo. PAD Sidoarjo telah berhasil mendanai 41 persen kegiatan pembangunan daerah. Ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sebesar 336 milyar rupiah dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan PAD ini tentunya secara tidak langsung berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik. Peningkatan PAD harus diimbangi pula dengan kemampuan pengelolaan anggaran serta penentuan prioritas-prioritas pembangunan daerah sehingga tujuan pembangunan dapat lebih cepat dicapai.

Sedangkan proporsi dana perimbangan sebesar 42 persen terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini menunjukkan bahwa andil pemerintah pusat masih cukup besar dalam mendukung pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo.

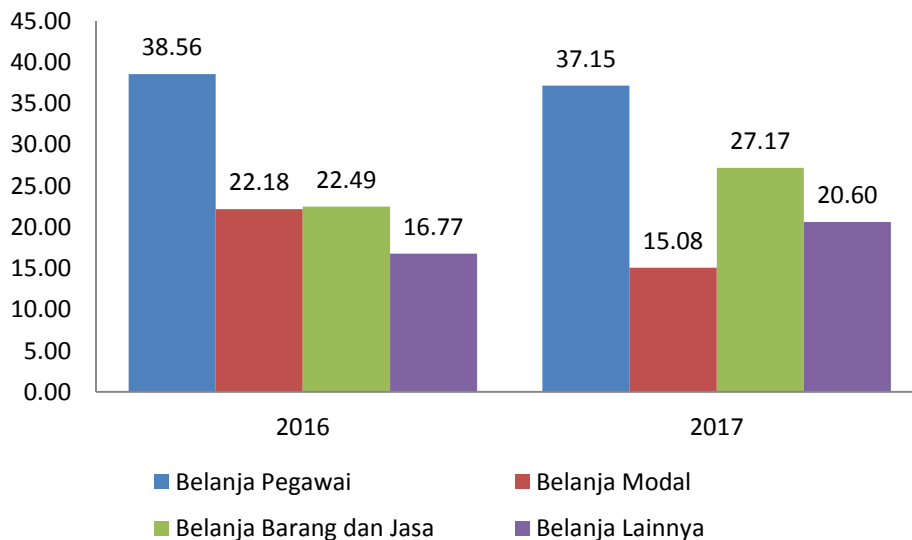
**Tabel 3.7.**  
**Perkembangan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2016- 2017**


URAIAN	Nilai (juta rupiah)	
	2016	2017
<b>A. PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3,668,042</b>	<b>4,045,428</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	1,335,284	1,671,550
2. Dana Perimbangan	1,690,088	1,708,887
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	642,670	664,991
<b>B. BELANJA DAERAH</b>	<b>3,651,620</b>	<b>3,748,309</b>
<b>1. Belanja Tak Langsung</b>	<b>1,935,801</b>	<b>2,036,792</b>
Belanja pegawai	1,323,573	1,264,759
Belanja Hibah	132,101	145,911
Belanja Bantuan Sosial	46,763	47,732
Belanja Lainnya	433,364	578,390
<b>2. Belanja langsung</b>	<b>1,715,819</b>	<b>1,711,517</b>
Belanja Pegawai	84,500	127,876
Belanja Barang dan Jasa	821,321	1,018,408
Belanja Modal	809,998	565,233

Secara agregat realisasi Belanja Daerah kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 3,7 triliun rupiah, mengalami kenaikan 2,64 persen dari tahun sebelumnya. Total belanja tidak langsung sebesar 2,04 triliun rupiah dan belanja langsung sebesar 1,7 triliun rupiah (lihat tabel 3.6).

Sebagian besar peruntukan realisasi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo digunakan untuk belanja pegawai. Pada tahun 2017, realisasi belanja pegawai daerah Kabupaten Sidoarjo mencapai 1,39 triliun rupiah. Jika disandingkan dengan besaran belanja pegawai tahun sebelumnya (sebesar 1,41 triliun rupiah), terjadi penghematan belanja pegawai sebesar 15,44 milyar rupiah. Hal ini dilakukan pemerintah daerah seiring dengan adanya efisiensi dan perbaikan kualitas SDM. Belanja pegawai yang relatif tinggi akan berdampak pada berkurangnya porsi belanja pembangunan lainnya. Tentunya diperlukan kreatifitas serta inovasi dari pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran sehingga porsi belanja pegawai mampu untuk diminimalkan dan digunakan untuk belanja modal maupun belanja pembangunan yang lain (lihat gambar 3.4).

**Gambar 3.4.**  
**Persentase Rincian Belanja Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2017**





Realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016 realisasi belanja barang dan jasa di Kabupaten Sidoarjo adalah sebesar 821 milyar rupiah atau sebesar 22,49 persen terhadap total realisasi belanja daerah. Pada tahun 2017, realisasi belanja barang dan jasa mencapai 1,02 trilyun rupiah atau sebesar 27,17 persen terhadap total realisasi belanja daerah. Terlihat pada tahun 2017 ada penambahan realisasi belanja barang dan jasa sebesar 197 milyar rupiah.

Di sisi lain, realisasi belanja modal Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, realisasi belanja modal mencapai 809 milyar rupiah. Pada tahun 2017, terjadi penambahan realisasi belanja barang dan jasa, sehingga mengurangi alokasi untuk belanja modal. Pada tahun 2017 realisasi belanja modal hanya sebesar 565 milyar rupiah.

Untuk realisasi belanja lainnya; meliputi belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja lainnya. Proporsi realisasi belanja lainnya walaupun ada sedikit peningkatan, tidaklah banyak berubah dari tahun sebelumnya, pada kisaran 20 persen.

Struktur belanja daerah secara keseluruhan sedikit banyak akan memberikan gambaran mengenai arah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Diharapkan dengan penentuan prioritas pembangunan yang lebih baik serta diiringi dengan tata kelola anggaran yang cermat akan mampu memberikan kemampuan daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata.

### **3.9. Indeks Pembangunan Manusia**

Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 7 tahun terakhir terus naik. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 adalah sebesar 78,70. Besaran IPM ini tergolong dalam kategori “tinggi”. Selama periode 2011-2017 angka IPM Kabupaten Sidoarjo sudah masuk dalam range “tinggi”. Pada tahun 2010 angka IPM Sidoarjo sebesar 74,78. Pada tahun 2012 sebesar 75,14; tahun 2013 sebesar 76,39; tahun 2014 sebesar 76,78; tahun 2015 sebesar 77,43 dan di tahun 2016 sebesar 78,17.



Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 7 tahun terakhir ini berada di atas Jawa Timur. Pada tahun 2017, dalam cakupan 38 Kabupaten/Kota se-Jawa Timur, posisi IPM Sidoarjo berada pada posisi keempat. Bahkan dalam cakupan kabupaten, Sidoarjo berada pada posisi pertama. Besaran IPM Kota Malang dalam tiga tahun sebelumnya (2014-2016) menduduki peringkat teratas; pada tahun 2017 digeser Kota Surabaya pada posisi pertama.

Capaian yang sangat menggembirakan ini tidak terlepas dari pemerintah daerah yang sellau melaksanakan program-program yang meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusianya.

**Tabel 3.8.**  
**Angka IPM dan Rangkaing IPM Kabupaten Kota Se-Jawa Timur**  
**Tahun 2017**

Kabupaten/Kota	Rangkaing	Skor		Kabupaten/Kota	Rangkaing	Skor
Kota Surabaya	1	81.07		Banyuwangi	20	69.56
Kota Malang	2	80.65		Blitar	21	69.33
Kota Madiun	3	80.13		Ngawi	22	69.27
Sidoarjo	4	78.70		Ponorogo	23	69.26
Kota Kediri	5	77.13		Malang	24	68.47
Kota Blitar	6	77.10		Trenggalek	25	68.10
Kota Mojokerto	7	76.77		Bojonegoro	26	67.28
Gresik	8	74.84		Tuban	27	66.77
Kota Pasuruan	9	74.39		Pasuruan	28	66.69
Kota Batu	10	74.26		Pacitan	29	66.51
Magetan	11	72.60		Situbondo	30	65.68
Mojokerto	12	72.36		Jember	31	64.96
Kota Probolinggo	13	72.09		Pamekasan	32	64.93
Tulungagung	14	71.24		Bondowoso	33	64.75
Lamongan	15	71.11		Probolinggo	34	64.28
Jombang	16	70.88		Sumenep	35	64.28
Nganjuk	17	70.69		Lumajang	36	64.23
Kediri	18	70.47		Bangkalan	37	62.30
Madiun	19	70.27		Sampang	38	59.90



## Komponen IPM

### 3.9.1. Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan direfleksikan dari Angka Harapan Hidup (AHH). AHH penduduk Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan metode baru dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2013 – 2017) stabil berkisar pada angka 73 tahun. Pada tahun 2013 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Sidoarjo 73,43 tahun; di tahun 2017 mencapai 73,71 tahun.

### 3.9.2. Dimensi Pendidikan

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang digunakan untuk mengetahui gambaran umum kemajuan pendidikan suatu wilayah.

#### 3.9.2.1. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang berarti. Pada periode 2013 - 2017 angka harapan hidup Kabupaten Sidoarjo berada pada kisaran 12—13 tahun (tahun 2013 sebesar 13,25; tahun 2014 sebesar 13,55; tahun 2015 sebesar 13,89 dan tahun 2016 sebesar 14,13). Pada tahun 2017 AHH Sidoarjo mencapai 14,34 tahun.

Hal ini berarti pada tahun 2017 penduduk Kabupaten Sidoarjo usia 7 tahun ke atas dapat mengenyam pendidikan formal sampai 14 tahun.

#### 3.9.2.2. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Tahun 2017 rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Sidoarjo sebesar 10,23 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk Kabupaten Sidoarjo menekuni pendidikan formal (sekolah) selama 10 tahun. Ketika pada jenjang pendidikan setingkat SD membutuhkan waktu normal 6 tahun dan pada jenjang pendidikan setingkat SLTP membutuhkan waktu normal 3 tahun; maka rata-rata penduduk Sidoarjo secara umum telah menamatkan pendidikan sampai pada jenjang setingkat SLTP, dan sudah melewati jenjang kelas 1 SMU.

### 3.9.3. Dimensi Pengeluaran

Kondisi ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingginya kemampuan daya beli. Semakin tinggi kemampuan daya beli masyarakat maka semakin baik kondisi ekonominya. Kemampuan daya beli masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tingkat pendapatan, pola konsumsi dan perkembangan harga-harga.

Perkembangan harga-harga akan mencerminkan tingkat inflasi. Jika terjadi kondisi pendapatan masyarakat turun sedangkan nilai inflasi naik maka kecenderungannya kemampuan daya beli masyarakat akan turun. Kalau dilihat secara umum kemampuan daya beli masyarakat tahun 2016 di Kabupaten Sidoarjo secara nominal mengalami peningkatan sebesar 3,43 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini seiring dengan meningkatnya nilai PDRB perkapita penduduk.

**Tabel 3.9.**  
**Pengeluaran Perkapita Yang Disesuaikan Kabupaten Sidoarjo**  
**Tahun 2013 - 2017**

Tahun	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun
2013	12.602
2014	12.632
2015	12.879
2016	13.320
2017	13.710



## **BAB IV**


### **PENUTUP**

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha bersama antara pemerintah, swasta serta masyarakat untuk mencapai tujuan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut, pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah menetapkan visi, misi dan strategi pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) maupun Jangka Menengah.

Pembangunan harus dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Diperlukan perencanaan dan penentuan prioritas pembangunan, monitoring dari proses pembangunan yang sedang berlangsung maupun evaluasi hasil yang pembangunan yang telah dicapai secara terus-menerus untuk lebih mempercepat pencapaian tujuan pembangunan itu sendiri. Pengumpulan berbagai indikator pembangunan menjadi dasar dari evaluasi hasil yang telah dicapai maupun untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

Beberapa indikator ekonomi yang ada di Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 yaitu tumbuh sebesar 5,80 persen, naik dari tahun sebelumnya sebesar 5,51 persen. Iklim ekonomi mulai membaik di Sidoarjo didukung stabilitas perekonomian nasional yang baik dan inflasi yang rendah di Jawa Timur dan nasional.
2. Tiga sektor ekonomi yang selalu dominan kontribusinya di Kabupaten Sidoarjo yaitu: 1) Industri Pengolahan, 2) Perdagangan, Hotel dan Restoran, 3) Pengangkutan dan komunikasi. Ketiga sektor tersebut telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Sidoarjo karena kontribusinya yang sangat tinggi (lebih dari 70 persen).
3. Inflasi Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 sebesar 4,11 persen. Inflasi tertinggi pada bulan Januari sebesar 1.53 persen dan terendah bulan Agustus yaitu -0,21 persen. Sementara pada bulan Juni (bertepatan hari raya Idul Fitri) yang biasanya mengalami inflasi tinggi



hanya mengalami inflasi 0.55 persen. Deflasi terjadi dua kali selama tahun 2017 yaitu bulan Maret dan Agustus.

4. Harga eceran di perdesaan untuk konsumsi makanan di Kabupaten Sidoarjo pada 2017 cenderung stabil antar bulannya. Sedangkan harga eceran perdesaan untuk konsumsi non makanan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya
5. Gini rasio kabupaten Sidoarjo selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir berada pada kisaran 0.30, dalam arti bahwa Kabupaten Sidoarjo masuk dalam kategori ketimpangan distribusi pendapatan *rendah*.
6. Sebagian besar peruntukan realisasi belanja daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 digunakan untuk belanja pegawai. Realisasi belanja barang dan jasa selama tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, sebesar 22,49 persen. Sedangkan realisasi belanja modal Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.
7. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2017 mencapai 4 trilyun rupiah. Secara agregat, Pendapatan Asli Daerah mampu penyumbang 1,67 trilyun rupiah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Sidoarjo. PAD Sidoarjo telah berhasil mendanai 41 persen kegiatan pembangunan daerah. Ada penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2017 sebesar 336 milyar rupiah dibanding tahun sebelumnya.
8. Capaian IPM Kabupaten Sidoarjo selama 7 tahun terakhir terus naik. IPM Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2017 adalah sebesar 78,70. Besaran IPM ini tergolong dalam kategori “tinggi”.